

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

G8 adalah sebuah lembaga internasional yang terbentuk atas respon Negara-negara maju terhadap krisis ekonomi internasional pada periode 1970-an. Dalam perkembangannya G8 banyak merekrut anggota-anggota baru dalam mempertahankan kelestarian hegemoni G8, pendiri G8 yakni AS, Perancis, Jerman, Inggris pada tahun 1973, pada periodisasi G4 ini telah membuktikan keberhasilan dalam menjalankan kerjasama kenegaraan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh krisis pada waktu itu. Kemudian G8 pun semakin diminati oleh Negara lain, kemudian bergabunglah Jepang, Italia, Kanada pada tahun 1976 serta yang terakhir Rusia pada tahun 1998.

Dalam mekanisme kerjanya G8 tidak memiliki kesekretariatan tetap atau anggaran khusus dalam roda organisasinya, dengan mekanisme bergiliran menjadikan G8 sebagai organisasi terbuka serta sebagai organisasi internasional yang responsif terhadap berbagai isu-isu ekonomi-politik-sosial-lingkungan dan sebagainya.

Dalam perannya di level internasional G8 memiliki kekuatan (determinasi) yang amat besar, dengan beranggotakan Negara-negara maju yang memiliki saham di Bank dunia dan lembaga donor IMF menjadikan G8 sebagai organisasi paling dominan terhadap dunia internasional. Selain itu Negara-negara anggota G8 juga bertindak sebagai basis korporasi-korporasi besar yang kemudian

menjadikan organisasi keegaraan ini sebagai instrumen utama globalisasi dan Neoliberalisme.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini dengan judul “Peran G8 Dalam Konsolidasi Neoliberalisme di Dunia Ketiga (Studi Kasus: Indonesia)” adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjawab pokok permasalahan dan hipotesa
2. Sebagai sarana menerapkan teori-teori Hubungan Internasional yang telah dipelajari selama menempuh bangku perkuliahan.
3. Sebagai upaya memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia yang menjadi catatan kelam sejarah dunia internasional, hal tersebut kemudian memicu sebuah perubahan yang amat signifikan terhadap keadaan di berbagai aspek kehidupan internasional. Poros-poros internasional pun terbentuk seiring berakhirnya perang dunia II ditandai oleh munculnya dua blok besar yang memiliki kekuatan *super power* di berbagai bidang kenegaraan, walaupun pada akhirnya fase perang dingin yang ditandai oleh perlombaan hegemoni, senjata dan teknologi di kedua blok yaitu blok barat dan blok timur atau selalu diistilahkan dengan pertarungan ideologi komunis sosialis dengan kapitalisme berubah secara drastis yang ditandai oleh runtuhnya Uni

Sovyet yang kemudian mampu dimenangkan oleh blok barat, maka dominasi global pun mulai menunjukkan dirinya dengan semangat kapitalisme yang diusung oleh Negara-negara kapitalis¹.

Pada dasarnya sejarah mengindikasikan bahwa kolonialisme dan dominasi yang dilakukan oleh Negara-negara kuat yang terjadi di paruh abad 19 dikarenakan motif ekonomi yang begitu kuat, perluasan kekuasaan pun tak lepas atas sebab motif penguasaan sumber daya alam. Hal tersebut memiliki legal dogmatis terutama dikalangan Protestan.

Menurut Marx Weber munculnya semangat kapitalisme diakibatkan oleh keretakan tradisi ekonomi yang terjadi di Negara-negara Eropa dengan melepaskan dogma-dogma keagamaan yang dipandang mengekang kebebasan sebagai seorang manusia. Kemudian Weber menjelaskan terkait etika Protestan, dalam Protestan bukan hanya mengendurkan pengawasan gereja atas kegiatan-kegiatan sehari, malahan lebih menuntut dari penganut agama protestan disiplin yang lebih keras daripada penganut agama katolik².

Secara utuh bahwa semangat kapitalisme yang ada di penganut agama Kristen Protestan menekankan bahwa kehidupan keagamaan harus berbanding lurus dengan kegiatan perekonomian. Hal ini memicu perkembangan dalam tubuh kapitalisme khususnya pasca Perang Dunia, pemerintahan sebuah Negara merasa tidak cukup untuk penguasaan industrial domestik semata, akan tetapi harus mampu mengendalikan secara aktif terhadap perekonomian makro dan pasar³.

Tercatat pada akhir abad kesembilan belas, pemerintahan di Negara-negara Eropa dan sekutu abadnya Amerika Serikat menyadari bahwa mereka sebagai

¹ Negara maju yang memiliki modal perekonomian yang kuat hasil dari terciptanya pembukaan pasar

² Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Ui Press, Jakarta, 1986, Hal. 154

³ I. Wibowo & Francis wahono, *Neoliberalisme*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, Hal. 17

Negara kapitalis bertanggung jawab terhadap ketidakadilan yang terjadi di dunia internasional, hal ini kemudian mengalami kristalisasi seiring dengan terjadinya peristiwa keruntuhan pasar saham *Wall Street* dan Depresi Besar, disusul kemudian dengan pecahnya Perang Dunia I. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pengangguran dalam jumlah yang sangat besar serta krisis sosial yang tercipta melalui strukturisasi kebijakan. Maka untuk mengatasi fenomena tersebut serta dalam proses meredam ancaman komunisme maka Negara-negara kapitalis mulai membangun sistem kesejahteraan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini kemudian mengembangkan sebuah konsepsi bahwa Negara harus mengambil alih kendali terhadap kontrol pasar yang memiliki relasi dengan pertumbuhan ekonomi setiap Negara.

Setelah terjadinya fakta-fakta internasional dalam relasi sosial ekonomi maka Negara diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian, serta mampu menjamin kesejahteraan sosial, kemudian lahirlah sebuah modifikasi liberalisme yang dipelopori oleh John. Maynard Keynes.

Seperti yang telah disinggung diatas, ilmu ekonomi Keynesian menekankan bahwa pemerintah dapat dan harus melakukan intervensi terhadap perekonomian terutama regulasi pasar, hal lain menurut Keynes bahwa ekonomi tidak mengalami kecenderungan alamiah untuk menciptakan "*full employment*"⁴. Maka dari hal itu, apabila dalam realita ekonomi tidak tercipta ruang yang cukup

⁴ Ibid, Hal 18

untuk kesempatan kerja maka pemerintah diperlukan untuk mengintervensi dan menciptakan lapangan kerja dengan melakukan *merger* antara pemerintah dan swasta. Tidak hanya melakukan merger dengan swasta, Keynes juga menekankan untuk membangun jaring pengaman kesejahteraan Negara yang populer dengan istilah *Welfare State* (Negara Persemakmuran). Prinsip ekonomi keynessian ini banyak diadopsi oleh banyak Negara di Eropa, pada tahun 1940 Inggris sepenuhnya mengadopsi prinsip Keynesian.

Pada masa itu Inggris dikuasai oleh pemerintahan Partai Buruh. Kemudian pada tahun 1946 Amerika Serikat dengan *Employment Act* mengharuskan Negara untuk menerapkan kebijakan *Full Employment* walaupun realiasi sistem ini muncul di Amerika Serikat tahun 1960 pada masa pemerintahan John F. Kennedy. Bahkan pada periodisasi tersebut Amerika Serikat secara langsung mengadopsi sistem *Welfare State* yang merupakan bagian utama dari prinsip ekonomi Keynesian.

Pada tahun 1973 dunia internasional mengalami depresi ekonomi karena terjadinya strukturisasi produsen minyak dengan OPEC dan kartel minyak lainnya, hal ini menyebabkan melambungnya harga minyak dunia. Tentu dengan melambungnya harga minyak dunia yang merupakan komoditi primer bagi Negara-negara barat (Negara-negara industrialis maju), berimplikasi langsung atas stabilitas ekonomi dan memicu munculnya inflasi di Negara-negara maju khususnya Eropa. Implikasi faktor ekonomi akan selalu menjadi faktor utama dari efek domino selanjutnya yaitu aspek sosial yang akan menimbulkan varian-varian

krisis yang pada akhirnya kulminasi dari krisis tersebut memunculkan sebuah distorsi sistem sosial.

Dalam hal ini prinsip ekonomi liberalisme yang dicetuskan oleh John M. Keynes tidak mampu memberikan solusi nyata terhadap depresi ekonomi yang dihadapi dunia internasional saat itu. Keyakinan Keynes yang menyebutkan inflasi tidak akan pernah muncul bersamaan dengan pengangguran⁵, gugur dengan sendirinya.

Dalam keadaan seperti ini jika prinsip lama tidak memberikan solusi maka dibutuhkan sebuah prinsip baru yang mampu menjawab keadaan depresi tersebut. Aspek pengelolaan perekonomian dengan pembatasan fiskal dan kontrol atas *money supply* menjadi bahasan utama di Negara-negara kapitalis.

Sebuah prinsip ekonomi muncul yang digagas oleh *Milton Friedman* dan *Friedrich August Von Hayek*, kembali mengulangi sekaligus melakukan evaluasi argumentasi klasik *Adam Smith* dan *J.S. Milton*, menyatakan bahwa masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yang bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis⁶, hal inilah yang melatar belakangi kebangkitan Neoliberalisme.

Dimulai pada tahun 1947, Friedrich August Von Hayek seorang ekonom asal Austria mengorganisir para ekonom disebuah konferensi tertutup selama

⁵ Ibid, Hal 19

⁶ Diakses <http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>

sepuluh hari di Mont Pelerin. Peserta konferensi tersebut antara lain Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, Aaron Director, Lionel Robbins, Walter Eucken, Erich Eyck, Wilhelm Ropke, Ludwig von Mises, Stanley Dennison, dan sebagainya⁷. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk kelompok dengan nama *The Mont Pelerin Society* (MPS) secara tetap mengadakan pertemuan rutin setiap dua tahun sekali. Kegiatan serta jaringan mereka meluas secara mencolok selama dasawarsa 1970-1980an.

Dalam gagasannya secara garis besar mengkritik perencanaan ekonomi sentralistik dan menawarkan keunggulan mekanisme ekonomi kapitalis dengan pasar bebasnya. Kemudian kedua tokoh utama seperti Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman mengkritisi gagasan ekonomi John M. Keynes yang dinilai justru akan membangkrutkan masyarakat⁸. Hal tersebut menurut kedua tokoh utama tersebut disebabkan oleh kontrol atas inflasi dan pengangguran berarti juga kontrol pemerintah atas peredaran uang. Secara tegas Milton Friedman menyatakan “ Ada satu, dan hanya satu, tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan akumulasi laba...”⁹

Dari kedua penggagas prinsip ekonomi baru dalam koridor Neo-Liberalisme memunculkan satu muara yang sama bahwa cara manusia bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua

⁷ *Op.Cit* , Hal 52

⁸ *Ibid*, Hal 53

⁹ *Ibid*, Hal 53

tindakan dan relasi antar manusia. Dengan kata lain setiap tindakan manusia merupakan ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung-rugi individual yang terjadi dalam kegiatan transaksi ekonomi.

Dari muara Neo-Liberalisme tersebut mengalami kristalisasi yang dikenal dengan istilah *Washington Consensus* yang berisikan ajaran Neoliberalisme serta paket kebijakan yang tidak hanya bersifat praksis ekonomi tapi bagaimana kegiatan menjadi relasi mendasar terhadap kegiatan politik, sosial, budaya.

Dengan munculnya kristalisasi yang ada di sistem ekonomi Neo-Liberalisme maka Neo-Liberalisme telah muncul dengan pola utuh yang diterapkan terhadap Negara-negara Dunia Ketiga yang dalam hal ini bermayoritaskan Negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II, banyak Negara di Asia, Afrika, dan Amerika latin yang mulai mengadopsi sistem ekonomi Neo-Liberalisme ini karena tuntutan modal pembangunan sebagai langkah substitusi ekonomi. Dalam memunculkan hubungan simbiosis mutualisme antara Negara maju dan berkembang maka dalam prinsip Neo-Liberalisme diperlukan adanya instrumen-instrumen legal untuk melakukan proses infiltrasi terhadap prinsip ekonomi Negara di Dunia Ketiga.

Oleh karena itu dalam rangka mengatasi problem perekonomian internasional yang ditengarai oleh faktor minimnya modal pembangunan pasca Perang Dunia II hal ini kemudian menjadi aspek implikatif atas meningkatnya pengangguran serta merosotnya tingkat kesejahteraan maka dibentuklah institusi-

institusi internasional seperti Badan Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia serta Organisasi Negara Donor G8.

Dalam hal ini *Group Of Eight (G8)* didirikan pada tahun 1973 yang dilatar belakangi oleh pertemuan tingkat menteri keuangan yang merupakan delegasi dari AS, Perancis, Jerman barat, Inggris di perpustakaan gedung putih (*Whitehouse Library*)¹⁰. Kemudian pada perkembangannya dari keempat Negara pendiri G8 kemudian bergabunglah Jepang, Italia, Kanada (1976), serta yang terakhir bergabung adalah Rusia pada tahun 1998. Dari institusi-institusi internasional tersebut memegang peran sentral dalam mengusung kolonialisme era baru, maka segala bentuk kepentingan ekonomi politik internasional pun dilancarkan. Institusi ini tidak hanya berakses melalui LOI (*Letter Of Intern*) akan tetapi lebih mendasar melalui regulasi, kebijakan publik, bahkan aspek ideologi pun menjadi *acessable* melalui penokohan kharismatik terhadap pemimpin Negara-negara berkembang.

Dengan lahirnya berbagai institusi internasional yang memiliki sistem kerja masing-masing sesuai dengan kapasitas tindakannya untuk terus mereproduksi kepentingannya maka telah menandai berakhirnya kolonialisme fisik dan mulailah fase Neo-Kolonialisme. Modus dominasi dan penjajahan tidak lagi secara fisik dan langsung, melainkan melalui penjajahan teoritis dan ideologi.

Fase kedua kolonialisme ini dikenal sebagai era pembangunan atau era developmentalisme. Periode ini ditandai dengan masa kemerdekaan Negara Dunia Ketiga secara fisik, tetapi pada era developmentalisme ini dominasi Negara-

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/G8>

negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dipertahankan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial mereka.

Dalam perkembangan praksisnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Negara anggota G8 serta kooperatifnya IMF dan Bank Dunia sebagaimana terekam dalam sejarah pada dekade hiperinflasi yang terjadi pada tahun 1960-1980an. Negara-negara anggota G8 mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pinjaman dana yang bertujuan untuk menekan inflasi yang berkepanjangan, pinjaman tersebut disalurkan melalui bank-bank sentral yang dimiliki oleh Negara anggota G8 tersebut.

Pinjaman yang diberikan kepada Negara-negara miskin dan berkembang dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek arahan Negara serta sebagai substitusi impor untuk pasar domestik. Akan tetapi pada tahun 1979 terjadi sebuah malapetaka terkait pinjaman yang diberikan oleh Negara-negara maju tersebut, pada awalnya Negara maju anggota G8 memberikan jaminan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Negara maju takkan mengakibatkan kebangkrutan ekonomi terhadap Negara penerima bantuan, hal ini dikarenakan suku bunga pinjaman yang riil (amat rendah) yang disesuaikan dengan hiperinflasi waktu itu.

Pada akhir 1979 sebagaimana yang saya sebutkan diatas dengan apologi untuk menekan hiperinflasi perekonomian dunia serta mengembalikan pertumbuhan ekonomi diputuskanlah kebijakan untuk menaikkan suku bunga pinjaman, tentu hal ini mengakibatkan *chaos* terhadap perekonomian Negara penerima bantuan dikarenakan belum stabilnya pembangunan di Negara penerima

pinjaman, secara umum pada akhir tahun 1979 perekonomian internasional mengalami resesi yang sangat parah. Resesi yang dialami perekonomian saat itu diakibatkan oleh pendapatan luar negeri Negara berkembang yang pada awalnya sebagai bantuan untuk memperbaiki perekonomian domestik berubah arah secara signifikan untuk menutupi hutang luar negeri pemerintah dengan hutang baru.

Perubahan kebijakan dengan menaikkan suku bunga riil terhadap pinjaman luar negeri Negara-negara berkembang mengindikasikan mobilitas modal secara global memungkinkan terjadinya sentralisasi dan integrasi fungsional seluruh bagian dunia dalam rantai produksi dan distribusi, perubahan nilai mata uang yang sangat cepat diiringi oleh pemusatan manajemen, kontrol dalam pembuatan sebuah keputusan arus modal antar bangsa. Institusi-institusi ini termasuk didalamnya, perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) dan multi nasional (MNC) yang menguasai, mengatur sumber ekonomi dunia serta kesejahteraan masyarakat internasional, serta lembaga keuangan internasional seperti (IMF dan Bank Dunia).

Lembaga-lembaga tersebut telah mendorong terselenggaranya kondisi yang dibutuhkan bagi terwujudnya akumulasi modal secara global. Pembagian dunia ke dalam Negara-negara utara dan mitra juniornya di selatan telah menciptakan politik (baik global maupun lokal) tata administrasi, dan hukum internasional yang memungkinkan berfungsinya sistem ini.

Kewajiban hutang yang sangat besar mendorong Negara-negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, beberapa bagian Asia terseret dalam arus

ketergantungan yang tak dapat diprediksikan kapan akan berakhir. Dalam arus ketergantungan tersebut mewajibkan Negara-negara berkembang untuk mengikuti kebijakan Bank Dunia dan IMF, dengan catatan untuk menerima bantuan luar negeri yang diperoleh harus melalui proses dampungan Bank Dunia dan IMF harus melalui kesepakatan program penyesuaian yang amat ketat oleh Negara debitur atau lebih dikenal *Letter Of Intern*. Secara tak langsung munculah sebuah poros baru dalam ekonomi politik internasional melalui agen-agen ekonomi dengan tujuan terbentuknya elite transnasional yang baru.

Elite-elite itu kini mengendalikan sistem pembuatan keputusan dan secara tepat memonopoli kekuasaan masyarakat global. Dengan demikian globalisasi secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan antara berbagai kelas dan kelompok sosial masing-masing Negara hingga jauh dari warga Negaranya. Sebagian bahkan telah menjelma menjadi wakil-wakil elite transnasional, program elite transnasional terlihat secara jelas untuk menstimulasi terciptanya sebuah kondisi yang paling menguntungkan dan menghilangkan semua gangguan demi terciptanya kapitalisme global.

Dengan berkomponenkan sistem ekonomi Neo-Liberalisme sebuah model sistem ekonomi yang senantiasa mencari kondisi-kondisi di setiap Negara dan kawasan di seluruh dunia bagi mobilitas dan bebasnya operasi modal.

Program Penyesuaian Struktural Neo-Liberal, mendesak Negara-negara Amerika latin dan Negara selatan lainnya untuk mencapai stabilitas makro-ekonomi sebagai syarat esensial aktivitas modal lintas bangsa. Model ini berusaha

untuk menemukan sebuah keselarasan kebijakan fiskal, moneter, nilai tukar, dan ukuran-ukuran sejenis lainnya yang dirancang untuk stabilitas makro-ekonomi biasanya diikuti oleh “Program Penyesuaian Struktural” (*Structral Adjustment Program*)

Model ini kemudian menggerakkan semua keadaan menjadi lebih menguntungkan (lebih efisien) bagi terciptanya pembaruan dan pertumbuhan akumulasi modal dalam arus baru yang mengglobal dan beriringan dengan itu melahirkan masyarakat yang siap menyongsong abad globalisasi.

Ironisnya tanpa satupun pengecualian, restrukturisasi Neo-Liberal mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan di seluruh Negara yang melakukan proses penyesuaian struktural itu. Seiring dengan kembalinya arus distribusi kekayaan ke atas menjauh dari pasar lokal tersedot oleh ekonomi global. Meningkatnya kesenjangan di seluruh dunia di bawah globalisasi yang sebelumnya tidak diperkirakan disertai dengan tumbuhnya hierarki-hierarki baru di sekeliling kesenjangan ini membawa dunia pada sebuah masyarakat *apartheid* yang terpecah belah dan menjalar keseluruh penjuru.

Otoritas yang dimiliki G8 terbilang besar dari kedelapan anggota hanya merepresentasikan 13% dari jumlah penduduk dunia, akan tetapi G8 mampu mengendalikan lebih dari 2/3 perekonomian dunia serta tercatat sebagai Negara-negara penghasil emisi gas tertinggi 43% dari emisi gas dunia¹¹. Tidak hanya itu G8 juga menjadi sebuah kekuatan politik dengan kepemilikan hak veto sebagai

¹¹ Diakses melalui Website: www.infid.org, Pertemuan Tingkat Tinggi G8 Di Jerman

anggota tetap dewan keamanan PBB yang diwakili oleh Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Rusia.

Tentu hal ini berkaitan langsung dalam menetapkan arah kebijakan politik luar Negeri dalam mereduksi kepentingan ekonomi politik Negara-negara yang tergabung dalam G8. Bentuk organisasi G8 ini tidak mewakili sekretariat tetap atau *budget* khusus dalam menjalankan organisasinya, forum G8 hanya berkumpul setahun sekali dalam merumuskan kebijakan atas kondisi internasional secara komprehensif.

Dengan proses rotasi ketua setiap tahun menjadikan organisasi ini sebagai organisasi kepentingan elite multinasional yang memiliki 48% suara di IMF serta 46% suara di Bank Dunia. Banyak kalangan yang memandang G8 sebagai organisasi sentral dalam mempertahankan Neo-Liberalisme dalam eksklusivitas hegemoni barat terhadap Negara-negara di Dunia Ketiga. Tidak hanya mengundang Negara-negara yang mengalami kemajuan ekonomi, G8 juga membentuk *Group Of Twenty (G20)* yang beranggotakan menteri-menteri keuangan dan direktur bank-bank sentral dari seluruh anggota G8+5 ditambah dengan Arab Saudi, Australia, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Uni Eropa pada tahun 1999.

Akan tetapi pada periode tahun 2000 para pemimpin Negara G8 sadar bahwa mulai bermunculan kekuatan baru dalam perekonomian yang diwakili oleh Republik Rakyat Cina dan Negara-negara lain seperti India dan sebagainya.

Maka dari hal itu G8 mulai mengundang Negara-negara yang mewakili perkembangan ekonomi signifikan dalam Konferensi Tingkat Tingginya (KTT),

maka sejak tahun 2005 Afrika Selatan, Brazil, Cina, India dan Mexico (Plus Five) diundang secara teratur dalam pertemuan G8. Namun dari langkah-langkah yang telah ditempuh G8 ini tidak serta merta menghilangkan kesan elitis dalam pola organisasi ini. Dalam pertemuan terakhir yang dilakukan di Jepang tepatnya di Toyako, Hokkaido isu strategis yang menjadi perhatian utama mengenai melonjaknya harga minyak dunia, krisis pangan, serta krisis finansial yang dialami Negara-negara maju.¹²

Keistimewaan yang dimiliki oleh Neo-Liberalisme adalah fleksibilitas sistem yang terus diproduksi serta modifikasi yang bertujuan untuk mempertahankan Neo-Liberalisme sendiri.

Hal lain yang dilakukan oleh Negara-negara penganut Neo-Liberalisme adalah dengan melakukan konsolidasi-konsolidasi antar batas wilayah Negara dengan sistem pasar bebasnya sehingga regulasi pasar bersifat Liberal, adapun peran-peran pemerintah lebih ditekankan pada eksese-eksese yang ditimbulkan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu dibentuklah sebuah badan perdagangan yang secara eksplisit mengawasi arus perdagangan antar dunia melalui kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian yang menjadi landasan hukum positif internasional, akan tetapi secara implisit badan perdagangan internasional ini yang bernama WTO (*World of Trade Organization*) adalah melakukan dominasi penuh atas perdagangan bebas di setiap regional dengan melakukan proses penyesuaian struktural, kemudian dari hal itu memicu penyesuaian regulasi yang berkenaan dengan perdagangan bebas.

¹² Dikutip dari Antara News Edisi 12 Juni 2008

Menurut James Petras dampak dari perdagangan bebas adalah terciptanya ketidakadilan yang meluas dan polarisasi sosial yang tinggi akibat represi Negara dengan regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh proses penyesuaian struktural¹³.

D. Pokok permasalahan :

1. Bagaimana peran G8 dalam melakukan konsolidasi Neoliberalisme?
2. Seperti apakah dampak-dampak yang ditimbulkan oleh konsolidasi Neoliberalisme G8 terhadap dunia ketiga?

E. Kerangka Dasar Teori

A. *Structural Power* (Susan Strange)

Pada prinsipnya Susan Strange menegaskan bahwa studi ilmu ekonomi lebih menekankan pada kehidupan ekonomi serta memiliki keterkaitan dengan kekuasaan yang mampu memberikan determinasi¹⁴. Dalam kehidupan ekonomi tersebut ada dua buah aspek sentral yaitu aspek otoritas dan aspek pasar.

1. Aspek Kekuasaan langsung/relasional

Pada prinsipnya aspek kekuasaan ini adalah bagaimana kemampuan mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan, dalam proses mempengaruhi tersebut dilakukan secara lunak ataupun memaksa.

2. Aspek kekuasaan tak langsung/struktural

Dalam aspek kekuasaan tak langsung ini adalah bagaimana membentuk dan menentukan struktur (misalnya, lembaga perdagangan internasional) yang

¹³ Dikutip dari Artikel www.rumahkiri.net

¹⁴ Diakses melalui <http://rum-omnibus.blogspot.com/2008/04/persinggungan-negara-dan-pasar.html>

mewadahi aktor-aktor Negara dalam melakukan perdagangan bebas seperti GATT, WTO.

Dalam prakteknya aspek kekuasaan struktural lebih memainkan perannya dibandingkan dengan aspek kekuasaan relasional. Dalam kekuasaan struktural sendiri bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Kekuasaan untuk menentukan agenda wacana
- b. Merancang aturan main dan kebiasaan dalam rezim yang mengatur hubungan antar-aktor dalam ekonomi politik internasional

Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh kekuasaan struktural adalah sebagai berikut ;

- a. *The security structure*, keamanan struktural tersebut adalah penjaminan keamanan oleh Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembang (lemah) akan tetapi ketentuan yang ada dalam keamanan struktur adalah bagaimana keamanan diberikan pada siapa serta mendapat apa? Tentu hal ini sangat berkaitan dalam prinsip perilaku ekonomi. Dalam keadaan ini siapa yang memberikan keamanan struktur harus seimbang dengan harga atau imbalan yang diterima oleh pemberi keamanan struktur tersebut.
- b. Mengatur dan mempengaruhi produksi Nasional sebuah Negara, hal ini kemudian bertujuan untuk menentukan diproduksi oleh siapa? serta untuk siapa? Serta ketentuan-ketentuan apa saja yang ada. Kemudian selain mengendalikan produksi kekuasaan struktural menekankan pada struktur finansial, hal ini memiliki tujuan bagaimana untuk merancang

kemampuan pemerintah dalam melakukan pinjaman dengan ketentuan yang bisa mempengaruhi privatisasi sektor publik.

- c. Determinasi pengetahuan menjadi sumber kekuasaan dalam hal ini bagaimana pengendalian pengetahuan serta bagaimana proses penyebaran pengetahuan tersebut menjadi unsur legal dalam kekuasaan pengetahuan.

Dari keempat hal tersebut merupakan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh kekuasaan struktural.

Adapun sasaran dalam kekuasaan struktural atau *Secondary Power Structures* adalah sebagai berikut ¹⁵:

- a. Sistem transportasi, pengendalian terhadap sistem transportasi transnasional
- b. Perdagangan, pengendalian terhadap sistem perdagangan internasional
- c. Energi, pengendalian *supply* energi bagi Negara-negara maju
- d. Kesejahteraan, membentuk dan menentukan sistem kesejahteraan dalam sistem developmentalis.

B. Teori Dependensia

Teori dependensia memiliki titik tolak awal yaitu keterbelakangan, keterbelakangan bukan kondisi yang menjadi ciri khas semua Negara. Keterbelakangan adalah proses dalam kerangka sistem kapitalis global yang

¹⁵ Dikutip dari Materi pelatihan Satu Nama yang direkapitulasi oleh: Mohtar Mas'ood, Riza Noer Arfani, Poppy S. Winanti

kepadanya Negara-negara dunia ketiga menjadi tunduk, mereka menjadi terbelakang sebagai produk yang disengaja dari konsep developmentalis Negara-negara maju. Keterbelakangan adalah proses yang dengannya kekuatan Kapitalis meluas untuk menaklukan dan menyengsarakan Dunia ketiga. Bentuk masyarakat sebelumnya di Dunia ketiga mungkin tidak berkembang, tetapi keterbelakangan dimulai hanya dengan kedatangan kapitalisme global.

Proses keterbelakangan ini mengalami ekspansi dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain. Hubungan saling ketergantungan antara satu atau banyak ekonomi, dan hubungan antara mereka dengan perdagangan dunia berada dalam satu ketergantungan. Adapun bentuk-bentuk dari ketergantungan adalah sebagai berikut :

Pertama, ketergantungan Kolonial yang ditandai oleh monopoli perdagangan yang dilengkapi dengan monopoli tanah, tambang dan tenaga kerja di Negara jajahan.

Kedua, ketergantungan *financial-industry* yang dimulai sejak era kemerdekaan dan ditandai oleh konsentrasi modal di Negara *centers*.

Ketiga, ketergantungan industri teknologi, muncul setelah perang Dunia kedua dan ditandai munculnya perusahaan multinasional yang mendirikan pabrik yang berkaitan dengan pasar domestik yang bergantung.

Menurut Dos santos, Teori Dependensia adalah relasi imperialisme internal dari Negara-negara dunia ketiga¹⁶.

Secara singkat posisi dependensia dalam status keterbelakangan adalah hambatan pembangunan bukanlah kurangnya modal ataupun keterampilan wiraswasta, tetapi adanya devisi buruh internasional, devisi buruh internasional dianalisis dalam hubungan antara region ada dua hal, *center* dan *periphery* diasumsikan sangat penting sangat penting karena transfer surplus terjadi di Negara *periphery* ke *center*. Kenyataan bahwa *periphery* telah diperas surplusnya dan *center* telah menggunakan hasil surplus itu bukan untuk tujuan pembangunan. Namun, pembangunan di *center* mengakibatkan keterbelakangan *periphery*. *Development* dan *underdevelopment* adalah dua aspek dari proses global yang tunggal. Semua region terlibat dalam proses ini disebut kapitalis, bedanya ada yang *central* dan ada kapitalis *periphery* (borjuasi). *Periphery* menjadi terbelakang karena hubungannya dengan *center*. Maka perlu bagi mereka untuk memutuskan hubungan (*disassociate*) dengan pasar dunia dan menekankan pada sikap berdikari. Untuk memungkinkan hal ini, transformasi politik secara revolusi diperlukan, begitu hambatan eksternal bisa disingkirkan secara otomatis pembangunan akan berjalan.

1. Dependensia Radikal (Celco Furtado)

Menurut Celco Furtado problem mendasar pada Negara berkembang adalah minimnya modal yang dimiliki, maka langkah solutif yang ditempuh

¹⁶ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist, Yogyakarta, 2006, Hal. 129

adalah melalui substitusi impor. Dalam perkembangan selanjutnya menurut Furtado ketergantungan Negara maju dalam membeli dan investasi mengakibatkan meningkatnya standar hidup yang ada. Dalam hal ini akan tercipta dasar demokrasi industri, yakni berbagai kekuatan politik akan mampu membatasi kekuatan para pemilik modal. Hal ini tidak begitu relevan terhadap keadaan yang dialami oleh Negara berkembang ketergantungan pada substitusi impor yang mulanya diyakini sebagai solusi akan minimnya modal berakibat pada kakunya struktur interen yang diwariskan oleh kolonialisme. Strategi industrialisasi tersebut menjadi ketergantungan terhadap pihak asing dalam hal ini melalui perdagangan ataupun investasi. Hal ini menimbulkan *interest* yang besar bagi industri asing dan oligarki domestik untuk menjaga sebagian besar penduduk yang tersingkirkan. Dengan cara itu menurut Furtado upah buruh akan tetap rendah dan keuntungan akan naik¹⁷.

Dalam hal ini sebuah Negara harus berdikari and merestrukturisasi seluruh perekonomian sehingga teknologi modern harus disebarluaskan ke seluruh lapisan sektor produksi. Hal itulah yang akan menjamin pemerataan distribusi pendapatan dan pada akhirnya akan mengakhiri proses marginalisasi masyarakat.

2. Dependensia Moderat (Cordoso dan Faletto)

Menurut Cardoso dan Felotto pembangunan ekonomi dengan konsep developmentalis telah memicu *interest* kelas dari waktu ke waktu. Ketergantungan ekonomi terhadap pasar dunia sangatlah krusial kaitan dan respons lokal bisa

¹⁷ *Ibid* Hal. 125

bermacam-macam. Proses pembangunan telah dimulai lebih awal dengan munculnya kelas menengah yang secara perlahan-lahan terserap oleh struktur kekuasaan Nasional. Oleh karena itu, titik beratnya pada perspektif moderat ini lebih ke aspek kekuasaan sosio-politik.

F. Hipotesa

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan awal bahwa :

1. G8 adalah aktor internasional yang mempunyai peranan penting dalam konsolidasi Neo-Liberalisme yang dijalankan melalui kebijakan-kebijakan struktural G8 ataupun melalui lembaga-lembaga internasional yang berada dalam kekuasaan struktural G8. Kebijakan tersebut secara optimal diaktualisasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. *Structural Adjustment Program* (SAP) yang mengharuskan Negara dunia ketiga mengikuti arahan Negara maju G8,
 - b. Mendorong transfer surplus Negara dunia ketiga ke Negara maju,
 - c. Mendorong terciptanya kompetisi pasar bebas, yang berada dalam teritori perdagangan bebas regional maupun internasional,
 - d. Terciptanya liberalisasi ekonomi di Negara dunia ketiga,
 - e. Mendorong terciptanya demokrasi industri yang memiliki ketergantungan terhadap investasi asing.
2. Dalam pola konsolidasi G8 bertujuan untuk membentuk pola ketergantungan Negara dunia ketiga terhadap Negara maju, dalam

ketergantungan yang tercipta dalam pola hubungan konsolidasi Negara dunia ketiga dengan Negara maju (G8) mengakibatkan keterbelakangan yang melanda Negara dunia ketiga dalam hal ini dialami secara masif oleh Negara Indonesia. Hal ini kemudian membentuk pola ketergantungan Negara Indonesia terhadap arus distribusi *capital* Negara maju yang kemudian berimplikasi pada pengendalian sistem ekonomi politik, eksplorasi ekologi tanpa batas yang dilakukan oleh korporasi raksasa yang berada di bawah naungan Negara maju, hilangnya aset-aset Negara yang terjadi melalui privatisasi, pengendalian kebijakan ataupun regulasi Negara yang harus disesuaikan dengan pola SAP's, demikian pula dengan pengendalian sistem sosial dan pendidikan yang dilakukan oleh Negara Indonesia harus sesuai dengan pola kebijakan yang dihasilkan melalui SAP's yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip Neo-Liberalistik sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah keluarga miskin absolut.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam sebuah penyusunan penulisan ilmiah seperti skripsi adalah sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Maka oleh karena itu penulis membatasi jangkauan penelitian dari awal terbentuknya G8 pada tahun 1973 sampai KTT G8 terakhir yang dilaksanakan Di Pulau Hokaido, Toyako, Jepang pada tahun 2008.

H. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

Dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik sebuah hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data sekunder yang empiris maka dalam metode penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan teknik *library research* atau penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, makalah-makalah, surat kabar, internet, majalah, kliping maupun dokumentasi yang lain.

I. Sistematika Penulisan

Disamping pemaparan yang penulis susun di atas, sebagai unsur dari penulisan yang paling penting dalam karya ilmiah, maka perlu adanya sistematika penulisan.

Dengan demikian penulisan skripsi ini tidak akan menyalahi kaidah penulisan ilmiah yang telah dibakukan dalam beberapa penulisan karya ilmiah.

BAB I. Pendahuluan dalam bab ini akan dikemukakan pendahuluan dari skripsi seperti pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. Pertumbuhan Mazhab Neoliberalisme. Dalam bab ini penulis akan mengulas tentang pertumbuhan Neoliberalisme di Negara-negara maju khususnya serta perkembangan yang terjadi dalam Neoliberalisme.

BAB III. Peran G8 dalam konsolidasi Neoliberalisme. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang terbentuknya G8 pada tahun 1973 serta peran-peran strategis G8 dalam melakukan konsolidasi Neoliberalisme di Negara-negara maju serta

penyebaran Neoliberalisme di Negara-negara dunia ketiga dalam agenda tahunan G8.

BAB IV. Dampak Konsolidasi Neoliberalisme G8 di dunia ketiga dengan studi kasus Negara Indonesia. Dalam bab ini penulis akan membahas seperti apakah konsolidasi Neoliberalisme yang dilakukan oleh G8 di dunia ketiga serta dampak-dampak yang terjadi di dunia ketiga khususnya Indonesia.

BAB V. Kesimpulan Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis diatas.